

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Rp 1,1 Triliun Aset Bermasalah
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Sabtu, 2 Juni 2018

Rp 1,1 Triliun

Aset Bermasalah

Ada tiga catatan utama BPK atas LKPD Kota Bandung 2017, yakni piutang sewa tanah, nilai aset tetap, dan utang jangka pendek. Total nilai aset yang masih bermasalah mencapai Rp 1,1 triliun dari total nilai aset yang ditaksir Rp 20 triliun. Perinciannya, aset senilai Rp 694 miliar disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan serta aset senilai Rp 430 miliar tidak diketahui keberadaannya.

Sama seperti pencatatan dan penilaian aset, piutang sewa juga menjadi masalah menahun yang menggajjal Pemkot Bandung meraih opini WTP. Tercatat ada 11.400 titik lokasi sewa tanah dan bangunan. Salah satu persoalan utama adalah perjanjian sewa yang sudah kedaluwarsa.

Pejabat Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Solihin menyatakan, meskipun target mencapai opini WTP meleset menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), seluruh pegawai Pemkot Bandung layak mendapatkan apresiasi. Kerja keras mereka mengejar target membuat pemkot berada dalam jalur yang tepat untuk segera mendapatkan opini WTP.

"Saya optimistis, sangat-sangat optimistis, kalau ritme dan semangatnya dijaga, tahun depan kita dapat opini WTP," tutur Solihin, Kamis

(31/5/2018), di Balai Kota Bandung.

Solihin berharap kegagalan mencapai target WTP tahun ini tidak membuat semangat para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung kendur. Justru ia menyemangati agar upaya memperoleh opini WTP semakin diperkuat.

Selain perbaikan pencatatan atau inventarisasi aset, Solihin juga menyoroti pentingnya penegakan aturan dalam program sewa aset. Pemkot tak perlu ragu menerapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi, termasuk modus yang jamak ditemui yakni penyewaan kembali aset ke pihak ketiga atau keempat. Harus ditelusuri juga laporan-laporan tentang jual-beli aset.

"Penilaian BPK itu juga soal prog-

res, kemajuan kita. Bukan berarti semua harus selesai. Tapi ada niat untuk memperbaiki setiap tahunnya. Pemkot Bandung sudah melakukannya," tutur Solihin.

Permasalahan pengurusan aset Pemkot Bandung tidak terlepas dari sejatiah pembentukan daerah ini. Penyerahan aset dari daerah induk Kabupaten Bandung menyisakan banyak pekerjaan rumah. Demikian juga waktu pemberlakuan sistem otonomi daerah.

Perbaikan

Sekretaris Inspektorat Kota Bandung Agus Slamet menyatakan, LKPD Kota Bandung 2017 sudah mengalami perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan laporan tahun-

tahun sebelumnya. Dari enam poin yang dikecualikan BPK pada laporan tahun 2016, pemkot berhasil menuntaskan separuhnya.

Poin permasalahan yang berhasil dituntaskan sepanjang tahun anggaran 2017 adalah piutang pajak, beban barang dan jasa, serta persediaan dana. Untuk pencatatan aset, misalnya, dalam laporan tahun 2016, nilai yang bermasalah mencapai Rp 2,2 triliun. Artinya sepanjang 2017, pemkot bisa menuntaskan inventarisasi aset senilai Rp 1,1 triliun.

"Butuh waktu untuk menginventarisasi aset. Tapi poinnya, pemkot telah menunjukkan kemajuan sangat signifikan. Kita hanya butuh waktu untuk menuntaskannya," ucapnya. (Tri Joko Her Riadi)***